



## **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### **KETERANGAN PERS Nomor: 006/HM.00/II/2025**

#### **Tanggapan Komnas HAM atas Penggusuran Rumah Singgah di Area RSUD Provinsi NTB, Kota Mataram**

Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penggusuran paksa rumah singgah gratis bagi pasien dan keluarganya di area RSUD Provinsi NTB, Kota Mataram, pada Senin, 24 Februari 2025. Penggusuran paksa tersebut diduga atas perintah pemerintah provinsi NTB dan melibatkan tindakan kekerasan serta penggunaan preman yang mengancam rasa aman para penghuni, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

Komnas HAM menyesalkan jika peristiwa penggusuran paksa yang terjadi benar adanya, mengingat adanya dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan pasien yang sedang dalam kondisi sakit. Bahkan dalam pemberitaan disampaikan bahwa peristiwa yang terjadi menimbulkan dampak serius, di antaranya seorang ibu yang mengalami patah kaki kiri dan seorang anak berusia 7 tahun yang mengalami trauma akibat pemukulan di kepala.

Diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama :

- a. Hak atas rasa aman
- b. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan;
- c. Hak perempuan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan;
- d. Hak atas kesehatan bagi pasien dan keluarganya;
- e. Hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Atas peristiwa ini, Komnas HAM akan meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan RSUD Provinsi NTB. Penting untuk mengingatkan bahwa tindakan penggusuran yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap kelompok rentan, bertentangan dengan standar nasional dan internasional HAM.

Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kelompok rentan, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong langkah-langkah konkret dalam penyelesaiannya.

**Jakarta, 28 Februari 2025**  
**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

**Uli Parulian Sihombing**  
**Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM**

Narahubung :  
Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai